
Analisis Kerja Sama Bangladesh dengan Bhutan Melalui Preferential Trade Agreement (PTA) Tahun 2020

Ida Ayu Kencana Dharmapatni¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerja sama antara Pemerintah Bangladesh dengan Bhutan dalam rangka kerja sama *Preferential Trade Agreement* (PTA) atau *Perjanjian Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* (BBPTA) yang ditandatangani pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada Bangladesh yang tidak mengurangi ketertarikan memulai *Preferential Trade Agreement* yang merupakan perjanjian bilateral pertama Bangladesh dengan Bhutan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ekspor impor yang tidak begitu menguntungkan bagi Bangladesh dalam hal volume perdagangan ataupun tujuan negara ekspor. Kemudian, Bangladesh dan Bhutan merupakan negara yang memiliki *power* seimbang sebagai pemain kecil di arena ekonomi global. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kepentingan Bangladesh dalam kerja sama BPPTA ini. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan ekonomi serta konsep hambatan tarif untuk memetakan maksud dan tujuan Bangladesh dengan adanya BPPTA. Kemudian didapatkanlah hasil yakni Bangladesh memiliki kepentingan ekonomi demi mendapatkan pengakuan internasional dengan membuktikan negaranya mampu lolos dari predikat *Least Developed Country* serta Bangladesh bermaksud mengurangi hambatan tarifnya, baik berupa upaya tarif bea rendah dan juga tarif eksklusif dari hubungan bilateralnya dengan Bhutan.

Kata-kunci : Hambatan Tarif, Kepentingan Ekonomi, Kerja Sama, Least Developed Country, Preferential Trade Agreement

Abstract

This research is motivated by the cooperation between the Government of Bangladesh and Bhutan in the framework of the Preferential Trade Agreement (PTA) or the Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement (BBPTA) which was signed in 2020. This research focuses on Bangladesh which does not reduce interest in starting Preferential Trade Agreement which is Bangladesh's first bilateral agreement with Bhutan. This is related to the export-import development which is not very profitable for Bangladesh in terms of trade volume or export destination countries. Then, Bangladesh and Bhutan are countries that have balanced power as small players in the global economic arena. This study uses a descriptive method and a qualitative approach to describe Bangladesh's interest in this BPPTA cooperation. This study uses the concept of economic interest and the concept of tariff barriers to map Bangladesh's aims and goals with the existence of BPPTA. Then the results were obtained, namely Bangladesh has an economic interest in gaining international recognition by proving that its country is able to pass the title of Least Developed Country and Bangladesh intends to reduce its tariff barriers, both in the form of low duty tariffs and also exclusive tariffs from its bilateral relations with Bhutan.

Keywords : *Cooperation, Economic Interests, Least Developed Country, Preferential Trade Agreement, Tariff Barriers*

Kontak Penulis

Ida Ayu Kencana Dharmapatni

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, 80237

E-mail : iakencana93@gmail.com

PENDAHULUAN

Bangladesh dan Bhutan merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan kenegaraan diawali dari pengakuan Bhutan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Bangladesh pada tahun 1973. Hubungan kedua negara kemudian terbangun lebih intensif melalui pertukaran perwakilan diplomatik pada tahun 1979 dengan misi residen yang didirikan tahun 1980 (MFA, 2013). Bangladesh dan Bhutan memiliki pengaturan perdagangan selama lebih dari empat dekade yang telah berlangsung dari tahun 1988 (Rizwanul, 2021).

Kerja sama perdagangan kedua negara yang telah berlangsung kurang lebih empat dekade tersebut dilakukan melalui mekanisme ekspor dan impor. Aktivitas berlangsung dengan volume perdagangan yang fluktuatif setiap dekade. Berdasarkan data dari pemerintah Bangladesh berikut perkembangan aktivitas ekspor impor antara Bangladesh dengan Bhutan satu dekade terakhir nampak menunjukkan tren yang naik turun.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Ekspor Impor Bangladesh Bhutan Tahun 2009-2018

Particulars	Fiscal Year									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Export to Bhutan	2.24	3.81	9.13	1.81	1.91	4.92	4.74	4.00	2.915	4.00
Import from Bhutan	11.98	18.62	20.82	24.64	22.51	28.71	21.60	27.70	33.13	
Trade Balance	-9.74	-14.81	-11.69	-22.83	-20.60	-23.79	-16.86	-23.70	-31	

(Sumber: *Bangladesh Export Promotion Bureau*, dikutip dalam *Embassy of Bangladesh*, 2020)

Berdasarkan data tersebut, apabila diamati dari sisi Bangladesh kegiatan ekspor Bangladesh ke Bhutan mengalami tren fluktuatif. Sedangkan kegiatan impor dari Bhutan mengalami tren yang juga sama naik turunnya tiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa Bangladesh tidak mendapatkan keseimbangan dalam kegiatan ekspor dan impor dengan Bhutan. Bahkan Bhutan bukanlah mitra dagang utama Bangladesh. Mitra dagang utama Bangladesh adalah negara-negara

dengan pemain besar dalam skala global. Negara mitra dagang utama Bangladesh berdasarkan data yang dirilis *World Bank* adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Sedangkan Bhutan dalam data tersebut menduduki jajaran tengah sebagai mitra dagang Bangladesh.

Bangladesh merupakan mitra dagang yang penting dari sudut pandang Bhutan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan data perkembangan ekspor impor Bangladesh dengan Bhutan dalam satu dekade terakhir, perihal ukuran pasar dan volume perdagangan, Bangladesh penting bagi Bhutan (Nadisa, 2020). Ridzwanul (2021) dalam tulisannya juga menyatakan bahwa Bangladesh merupakan tujuan ekspor terbesar kedua dan sumber impor terbesar kedelapan bagi Bhutan. Perbedaan sudut pandang kedua negara dalam perihal ekspor impor tidak menyurutkan keinginan Bangladesh untuk membangun kerja sama yang lebih dekat dengan Bhutan.

Bangladesh dan Bhutan kemudian membangun kerja sama yang lebih dekat dalam kerangka perjanjian *Preferential Trade Agreement* (PTA) pada tahun 2020. *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Pemerintah Bangladesh dengan Bhutan ditandatangani pada 6 Desember 2020. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan perayaan 50 tahun pengakuan Bhutan atas Bangladesh.

Perjanjian *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* (BBPTA) menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ekspor impor yang tidak begitu menguntungkan Bangladesh dalam hal volume perdagangan ataupun tujuan negara ekspor. Namun Bangladesh tidak mengurangi ketertarikan memulai *Preferential Trade Agreement* secara bilateral pertama dengan Bhutan. Hal menarik lainnya adalah negara pada umumnya melakukan aktivitas kerja sama dengan negara yang memiliki perbedaan *power*. Misalnya antara negara maju dengan negara

berkembang. Pada situasi ini Bangladesh dan Bhutan merupakan negara yang memiliki *power* seimbang sebagai pemain kecil di arena global namun melakukan *Preferential Trade Agreement*. Maka berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menarik untuk menggali lebih dalam terkait kepentingan Bangladesh melakukan kerja sama *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* (BBPTA) tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan tiga literatur yang berkaitan dan membantu menjadi sumber acuan dalam menulis tulisan ini. Literatur pertama menggunakan jurnal dengan judul "*Bangladesh-Bhutan PTA: Less Is More?*" yang ditulis oleh Md. Rizwanul Islam dan diterbitkan pada tahun 2021. Adapun penelitian ini akan membahas topik yang sama namun berbeda sudut pandang. Penelitian ini akan menggunakan sudut pandang hubungan internasional serta membahas tujuan yang hendak dicapai dalam *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* 2020. Dalam literatur pertama, Islam (2021) menulis berdasarkan perspektif kritis latar belakang terbentuknya perjanjian *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* 2020. Nantinya, tulisan Islam (2021) akan berkontribusi untuk menjelaskan gambaran umum yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* 2020 dalam penelitian ini.

Peneliti kemudian menambahkan literatur kedua yang berjudul "*Motivasi Indonesia Menandatangani Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan Pakistan tahun 2012" oleh Khairul Hafiz (2013). Tulisan tersebut memberikan kontribusi pada penelitian ini dalam melihat tujuan negara melakukan penandatanganan PTA agar dapat bersaing di perdagangan internasional. Tulisan ini juga berkontribusi untuk menunjukkan relevansi bahwa garis sejarah dan persamaan negara dapat menjadi faktor pendorong yang kuat untuk membangun kerja sama perdagangan

yang lebih intensif untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Terakhir Peneliti menambahkan literatur ketiga yang berjudul "*Importance and Motives of Preferential Trade Agreements in the EU's External Trade*" oleh Elzbieta Kawcka-Wyrzykowska (2020). Tulisan ketiga berkontribusi untuk menunjukkan bagaimana sebuah organisasi menggunakan PTA untuk mencapai kepentingan ekonomi (perluasan perdagangan) dan juga politis (mengurangi resiko ancaman perbatasan). Tulisan ketiga melihat organisasi regional sebagai aktor sedangkan penelitian ini akan berfokus pada negara sebagai aktor dalam PTA yang ingin mencapai kepentingan negaranya.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini nantinya akan memberikan sebuah gambaran baru dari sebuah kerja sama. Penelitian ini nantinya akan melihat bagaimana kerja sama *preferential trade agreement* mampu mewujudkan kepentingan suatu negara. Bangladesh sebagai aktor utama memiliki peran besar dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mewujudkan kepentingan serta keuntungan (Indrayanthi, 2020). Tidak hanya kepentingan ekonomi saja, namun melalui kerja sama *preferential trade agreement* Bangladesh ingin mewujudkan negara yang mampu terbebas dari status *least development country*. Penelitian ini nantinya mampu menampilkan sebuah gambaran bahwa dari pelaksanaan perjanjian *preferential trade agreement* Bangladesh mampu mengubah status negara Bangladesh sebagai *development country*.

Peneliti menggunakan dua buah konsep yang sekiranya dapat menjawab dari penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan Peneliti yaitu konsep kepentingan nasional oleh Donal E. Nuechterlein (1979) dan konsep hambatan tarif (*tarrif barrier*).

Donal E. Nuechterlein (1979) menyatakan beberapa konsep dalam kepentingan nasional. Kepentingan nasional

merupakan kepentingan yang mencakup kebutuhan negara dalam hubungannya dengan negara lain, diantaranya:

1. Kepentingan Pertahanan : kepentingan yang mencakup perlindungan maupun keamanan dari ancaman terhadap negara maupun warga negara yang mampu memengaruhi kestabilan politik negara.
2. Kepentingan ekonomi : kepentingan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi melalui hubungan relasi dengan negara lain, mengingat tiap negara menginginkan kondisi perekonomian yang baik dan stabil.
3. Kepentingan tatanan dunia : kepentingan keamanan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional sehingga rakyat dan badan usaha dapat bekerja di luar batas negara.
4. Kepentingan ideologi : kepentingan perlindungan terhadap nilai yang dipercaya masyarakat dari negara yang berdaulat, apalagi ideologi merupakan sebuah pedoman bagi suatu negara dalam merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kepentingan nasional.

Berdasarkan pemaparan konsep kepentingan milik Nuechterlein tersebut dapat digunakan dalam menjelaskan kepentingan nasional yang ingin diwujudkan Bangladesh dalam tindakannya melakukan kerja sama dengan Bhutan. Dari pemaparan aspek-aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling cocok untuk menjelaskan permasalahan ini. Melalui kerja sama *preferential trade agreement* (PTA), diharapkan kedua negara mampu mewujudkan hubungan baik sehingga tercapainya kepentingan nasional. Khususnya Bangladesh yang memiliki kepentingan dalam sektor ekonomi, sehingga melalui kerja sama PTA sebagai wahana yang tepat untuk menghantarkan Bangladesh mencapai kepentingan tersebut.

Konsep kedua yang digunakan untuk landasan penelitian ini adalah hambatan tarif.

Tarif atau bea merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperjualbelikan melewati batas territorial negara (Ikhsan, 2020). Penggunaan tarif merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional.

Menurut Rastikarany (2008) kebijakan terkait hambatan tarif yang dikenakan dalam bentuk bea dibagi menjadi :

1. Tarif rendah : tarif dikenakan sebesar 0%-5%.
2. Tarif sedang : tarif dikenakan sebesar 5%-20%.
3. Tarif tinggi : tarif dikenakan diatas 20%.

Adapun menurut Amir (2003) sistem tarif yang diterapkan negara yang penggunaannya telah disepakati dibagi menjadi:

1. *Single Column Tariff* : yaitu tarif yang dikenakan pada komoditi impor yang persentasenya sama yang berasal dari negara mana saja.
2. *General/Conventional Tariff*: yaitu tarif yang dikenakan pada komoditi yang memiliki nilai persentase lebih besar dibandingkan persentase komoditi negara lainnya.
3. Tarif Preferensi (*Preferential Tariff*) : yaitu tarif eksklusif yang dikenakan pada komoditi tertentu yang bahkan nilainya sampai menjadi nol persen, dikarenakan adanya hubungan spesial dibandingkan komoditi negara lain.

Berdasarkan pemaparan konsep hambatan tarif (*tariff barrier*) tersebut dapat digunakan sebagai salah satu langkah Bangladesh untuk melakukan kerja sama dengan Bhutan. Penerapan tarif preferensial membantu menjelaskan fenomena kerja sama antara Bangladesh dengan Bhutan. Melalui kerja sama *preferential trade agreement* (PTA), kedua negara sedang berupaya untuk mewujudkan hubungan baik sehingga tercapainya kesepakatan bersama terkait sistem tarif yang nantinya menentukan bagaimana *preferential trade agreement* (PTA) dapat terlaksanakan. Khususnya dengan menerapkan tarif preferensi kedua negara tidak memiliki hambatan dalam proses ekspor maupun impor komoditi bagi

kedua negara. Hal ini menjadi langkah dan gagasan awal untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan ekonomi kedua negara.

METODE

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian dengan menganalisis fenomena sosial berdasarkan interpretasi individu dalam latar alamiah (Martono, 2015). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang mana menurut Neuman (2008) metode deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan proses, mekanisme atau hubungan antar kelompok memberikan gambaran verbal tentang suatu penelitian serta menunjukkan dasar informasi mengenai latar belakang atau konteks tertentu dari suatu gejala sosial.

Metode deskriptif serta pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kepentingan Bangladesh dalam *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* (PTA). Metode ini juga bertujuan untuk menunjukkan korelasi antara kerangka berpikir dengan fenomena ekonomi politik dan dipertegas melalui data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan diplomatik yang telah dibangun mendorong Bangladesh dan Bhutan melakukan kerja sama di tingkat regional maupun bilateral. Perjanjian bilateral kedua negara, di tanda tangani pada tahun 1980 yang kemudian berlaku pada tahun 1988 ketika negara India mengizinkan mereka mengangkut produk-produk perdagangan menuju dan dari negara *landlocked* (wilayah tanpa laut). Kemudian perjanjian bilateral tersebut diperbaharui pada tahun 2003 dan 2009. Dalam praktek perdagangannya, kedua negara menggunakan jalur dagang dimulai dari kota atau titik pos “*Burimari* (Bangladesh) - *Changrabandha* (India) - *Jaigaon* (India) - *Phuentsholing* (Bhutan)” (Islam, 2021).

Hasil kerja sama bilateral tersebut mendorong untuk kedua negara meningkatkan

intensitas kerja sama melalui BBPTA untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masing-masing negara. Terlebih lagi Bangladesh kurang dapat merasakan kebermanfaatannya mekanisme kerja sama sebelumnya. BBPTA direalisasikan dalam mekanisme ekspor impor dengan bertumpu pada penghilangan hambatan tarif dan meningkatkan varietas komoditas yang diperdagangkan.

Bangladesh Bhutan Preferential Trade Agreement memberikan kemudahan tarif dengan memberi kemudahan akses 18 produk Bhutan dan 90 produk Bangladesh. Produk Bhutan didominasi oleh hasil alam sedangkan Bangladesh didominasi oleh industri *readymade garments*. Komoditas yang diperdagangkan merupakan komoditas unggulan masing-masing negara yang dibutuhkan oleh negara tujuan.

Adapun perkembangan kerja sama ekonomi Bangladesh dan Bhutan sebelum perjanjian BBPTA hingga perjanjian terealisasi dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 1.2 Produk Ekspor Bangladesh 5 Tahun Sebelum 2021

Principal Commodities	(Million Tk.)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Readymade garments	2449245	2513449	2867433	2274744	2778659
Made up textile articles	78677	82085	78501	65458	109676
Vegetable textile fiber/yarn	70382	74119	61665	59228	89865
Shrimps and prawn	40779	35094	34244	35094	29372
Footwear	67977	66367	73819	61719	79730
Hides, skins and leather	19045	15118	13961	7978	14723
Raw jute	1308	12781	9451	12781	12626
Special Woven fabrics	4536	4037	4759	3288	3789
Fertilizer	441	1	-	-	495
Hats and other headgear	16025	15075	17358	14859	19712

Note: (-) denotes no export of the item in that year.

Perkembangan produk ekspor Bangladesh terhitung dari tahun 2016 sebelum perjanjian BBPTA hingga 2021 tahun pertama realisasi BBPTA mengalami kenaikan yang cukup positif. Sebelum perjanjian BBPTA, produk-produk Bangladesh mengalami perkembangan fluktuatif. Apabila diamati secara nilai mengalami variasi yang tidak stabil. Namun setelah perjanjian BBPTA dilaksanakan tahun 2020, pada 2021 sebagai tahun pertama

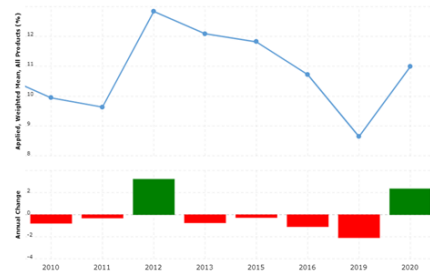
realisasi BBPTA, produk-produk Bangladesh berangsur mengalami kenaikan.

Komoditas yang diekspor oleh Bhutan merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh Bangladesh. Hal ini tentu berkorelasi dengan tujuan Bangladesh untuk merealisasikan mega proyek. Bangladesh mendapatkan bahan baku untuk merealisasikan mega proyek melalui kerja sama preferensialnya dengan Bhutan. Mega proyek yang sedang disusun oleh Bangladesh bertujuan untuk menunjang perkembangan ekonomi Bangladesh.

Dikutip dari halaman situs *The Financial Express*, penyelesaian mega proyek pembangunan Bangladesh diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 4 % dan ditujukan untuk mencapai 48% pada tahun fiskal mendatang. Tujuh dari delapan mega proyek tersebut antara lain: Jembatan Padma, Jembatan Kereta Padma, Mass Rapid Transit atau Kereta Cepat Dhaka, Jalur kereta api Chattogram-Cox's Bazar, pembangkit listrik tenaga nuklir Rooppur, pembangkit listrik tenaga batubara Matahari 1200MW dan pelabuhan laut dalam Payra. Infrastruktur tersebut sangat penting dan menjadi fokus utama bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh (Syed, 2022).

Adapun hal yang membedakan kerja sama Bangladesh dan Bhutan sebelum perjanjian preferential dan BBPTA adalah berfokus terhadap pengabaian tarif untuk beberapa komoditas unggulan masing-masing negara. Adapaun perbandingan tarif sebelum BBPTA dan saat BBPTA dapat diamati sebagai berikut:

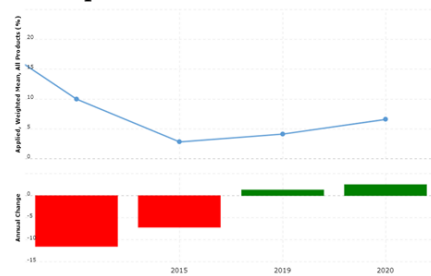
Grafik 1.1 Perkembangan Tarif Pajak Impor Bangladesh Tahun 2010 - 2020



Sumber: *Macrotrends (n.d.)*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah perjanjian dagang tertulis tahun 2010, tarif pajak impor Bangladesh tidak stabil. Terjadi tren naik turun yang tidak konsisten. Namun pada tahun 2020 pajak impor Bangladesh bernilai positif.

Grafik 1.2 Perkembangan Tarif Pajak Impor Bhutan Tahun 2010 - 2020



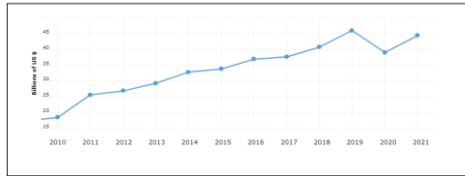
Sumber: *Macrotrends (n.d.)*

Ada sedikit perbedaan antara perkembangan pajak impor Bangladesh, pajak impor Bhutan berdasarkan perkembangan data dagang tidak tertulis yang berlaku mulai tahun 2010 menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang secara konsisten positif. Terhitung mulai tahun 2010 hingga 2019, pajak mengalami nilai yang positif.

Pajak impor sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional karena hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan pihak ketiga akan melakukan perdagangan internasional di suatu negara. Jika tarif pajak impornya suatu negara relatif rendah, berkemungkinan menarik pihak negara untuk berdagang di negara tersebut, namun juga sebaliknya.

Berlanjut ke data ekspor dan impor kedua negara tersebut dari *World Bank* yang diolah oleh situs *Macrotrends.net*, menunjukkan gambaran hasil ekspor dan impor yang fluktuatif, berikut datanya :

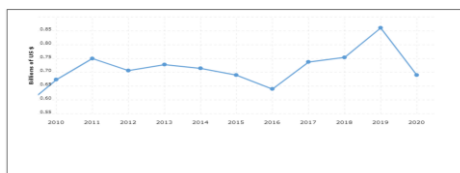
Grafik 1.3 Data Perkembangan Ekspor Bangladesh Tahun 2010 - 2021



(Sumber: *Macrotrends (n.d.)*)

Terdapat besar nilai dalam juta dolar US untuk menjelaskan perkembangan ekspor Bangladesh. Data tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya, perjanjian dagang tertulis Bangladesh dan Bhutan tahun 2010 menerangkan bahwa nilai ekspor Bangladesh ke Bhutan mengalami kenaikan dari segi nilai (uang). Pada tahun 2010 hingga 2019 secara konsisten Bangladesh mengalami lebih peningkatan ekspor secara konsisten.

Grafik 1.4 Data Perkembangan Ekspor Bhutan Tahun 2010 - 2020



(Sumber: *Macrotrends (n.d.)*)

Berbeda dengan Bangladesh, Bhutan pada periode 2010 mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif. Nilai ekspor Bhutan cenderung tidak konsisten tiap tahunnya. Bhutan sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan tajam di tahun berikutnya.

Aktivitas ekspor dan impor negara Bangladesh dan Bhutan memiliki tren yang menarik. Ekspor kedua negara mengalami tren kenaikan namun terlihat negara Bangladesh

lebih unggul dalam hal jumlah nilai ekspor dengan faktor banyaknya bidang ekspor. Kemudian untuk impor, Bangladesh cenderung mengalami tren positif mengingat bahwa populasi penduduk Bangladesh sebagai pangsa pasar membutuhkan perdagangan yang lebih daripada negara Bhutan yang memiliki tren konstan cenderung turun di akhir 2019 dengan kemungkinan penyebab populasi penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Bangladesh.

Tingkat pajak impor dan tingkat perkembangan ekspor impor juga menjadi poin menarik. Dapat diamati bahwa Bangladesh memiliki tren positif dalam hal pajak impor, dan tingkat perkembangan ekspor impor. Sama halnya dengan Bhutan, namun memiliki kecenderungan tren konstan negatif pada tingkat impor. BBPTA menjadi sebuah jalan untuk mengembangkan tingkat ekspor impor kedua negara, meskipun tidak terlalu signifikan, perjanjian lama yang tak tertulis di tahun 2010 cukup mengubah laju perkembangan perdagangan internasional kedua negara, meskipun sedikit.

Disamping itu, karena tingkat pajak impor Bangladesh yang begitu tinggi, yakni sekitar 14,8% dan lebih tinggi lagi untuk produk agrikultur yakni sekitar 18,1% diperlukan sebuah kebijakan bebas tarif untuk negara yang memiliki nilai strategis untuk Bangladesh. Kebijakan bebas tarif yang dirangkum dalam BBPTA nantinya akan memberikan keringanan beban produk untuk Bhutan berdagang di Bangladesh. Kebijakan BBPTA ini dalam jangka panjang dapat menguntungkan produsen-produk kedua negara dalam memasukkan barangnya baik ke dalam masing-masing pasar kedua negara.

Ditinjau dari teori kepentingan nasional yang diungkapkan oleh Donal E. Nuechterlein (1979), Bangladesh termasuk negara yang menerapkan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi untuk menginisiasi BBPTA ini. Dengan tujuan kesejahteraan ekonomi.

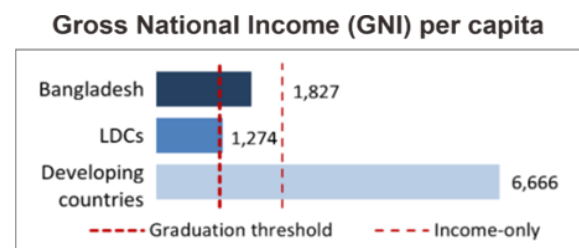
Perkembangan BBPTA 2020 ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga mempengaruhi percepatan kemajuan perdagangan yang nantinya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bangladesh. Hal itu juga merupakan wujud tertulis dari perjanjian kerjasama bilateral dahulu tahun 2010 yang belum diwujudkan hanya sebatas *framework*. BBPTA ini diharapkan melengkapi legalitas dan implementasi *framework* perjanjian Bangladesh Bhutan yang telah dimulai dari tahun 2010.

Kondisi yang secara sekilas sangat menguntungkan Bhutan ternyata memiliki nilai strategis untuk Bangladesh dengan mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang. Bangladesh ingin mempertahankan interdependensi ekonomi antara Bangladesh dengan Bhutan. Pertama Bangladesh menerima pembebasan biaya pajak impor ke pasar Bhutan. Kedua, Bhutan sebagai negara pengekspor bebatuan besar, bebatuan kapur dan semen yang sangat dibutuhkan oleh Bangladesh untuk program pembangunan mega infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting dalam mempersiapkan Bangladesh untuk keluar dari predikat *Least Development Country*. Sehingga dengan memberikan kemudahan akses untuk masuknya produk-produk Bhutan akan membantu Bangladesh dalam pemenuhan kebutuhan strategis untuk mencapai kepentingan tersebut.

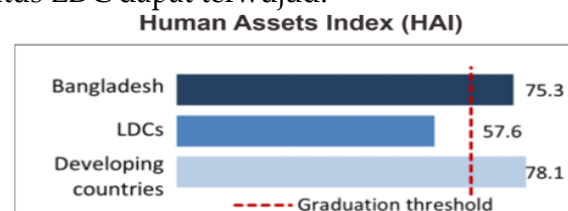
Berbicara mengenai LDC, merupakan sebuah predikat yang mengategorikan suatu negara berdasarkan kemampuannya dalam tiga hal, yakni: Pendapatan bruto nasional atau GNI (*Gross National Income*), Aset kemanusiaan (*human assets*), dan Kerentanan ekonomi dan lingkungan (*Economic and Environmental Vulnerability*). Suatu negara dikatakan lulus dari predikat LDC jika memenuhi batas indikator dari 3 hal tersebut.

Indikator yang mempengaruhi batas lulus suatu negara adalah pertama indikator pendapatan nasional adalah 20 persen di atas ambang batas inklusi (ambang batas yang ditetapkan untuk masuk dalam kategori negara LDC). Kemudian untuk ambang batas lulus dalam indikator indeks aset kemanusiaan adalah mencapai atau melebihi 10 persen dari batas inklusinya (batas inklusi dalam indeks aset kemanusiaan adalah 60). Terakhir, untuk lulus dalam indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan adalah mencapai atau melebihi 10 persen di bawah batas inklusinya (batas inklusi dalam indeks ini adalah 32). (*United Nation: Department of Economic and Social Affairs (n.d.)*)

Grafik 1.5 Progres Bangladesh dalam Usaha Lulus dari Predikat Negara LDC Berdasarkan Laporan Umum di Tahun 2021

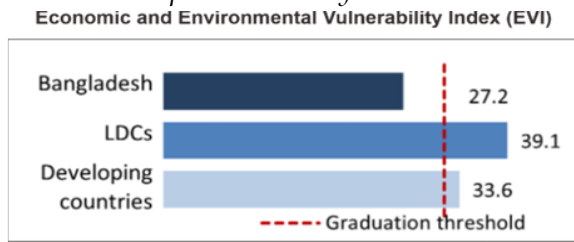


Dari data tersebut, tampak dalam indikator pertama *Gross National Income (GNI)*. Bangladesh sudah memenuhi setengah persen dari persyaratan kelulusan. Apabila Bangladesh konsisten dan fokus dalam aktivitas perdagangan maka kemungkinan pada tahun 2026 harapan Bangladesh untuk keluar dari status LDC dapat terwujud.



Indikator kedua yaitu *Human Assets Index (HAI)*. Bangladesh sudah memenuhi bahkan melampaui ambang batas kelulusannya. Bangladesh pada indikator ini memerlukan konsistensi dalam mempertahankan bahkan

meningkatkan indikator HAI agar dapat lolos dari *Least Development Country*.



Terakhir adalah indikator ketiga *Economic and Environmental Vulnerability Index* (EVI). Bangladesh pada indikator ini belum bisa memenuhi ambang batas minimum untuk dapat mencapai standarisasi perubahan status negara. Bangladesh kurang sedikit lagi mencapai batas kelulusannya. Jika Bangladesh fokus menggarap indikator pertama dan ketiganya, kemungkinan target lulus di tahun 2026 akan segera terwujud (*United Nation: Department of Economic and Social Affairs, (n.d.)*)

Bangladesh tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang mampu didapatkan dengan memberikan kemudahan akses untuk produk Bhutan. Bangladesh secara langsung juga diuntungkan dengan kemudahan akses ke pasar Bhutan. Bangladesh dalam perjanjian BBPTA mendapatkan keuntungan secara langsung dengan diversifikasi pasar. Kuantitas jenis produk yang di ekspor ke Bhutan semakin bervariasi. Bangladesh juga dapat memasarkan produk yang menjadi keunggulannya seperti industri tekstil. Bangladesh menggunakan BBPTA sebagai wahana untuk ekspansi pasar demi mempersiapkan Bangladesh menuju predikat yang lebih baik.

Donal E. Nuechterlein (1979) dalam konsep kepentingan ekonomi menjelaskan bahwa kepentingan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi melalui hubungan relasi dengan negara lain, mengingat tiap negara menginginkan kondisi perekonomian yang baik dan stabil. Konsep ini mampu menunjukkan dan menjadi dasar kebijakan Bangladesh dalam kerangka *Bangladesh Bhutan Preferential Trade*

Agreement. Bangladesh dan Bhutan bukan merupakan pemain besar dalam skala global. Mereka merupakan pemain kecil dalam skala pergaulan internasional, sehingga persamaan ini mendorong untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara melalui BBPTA. Walaupun hal ini nampak kurang rasional namun ini dilakukan sebagai langkah alternatif untuk mencapai kepentingan yang diinginkan Bangladesh.

Bangladesh menginginkan kerja sama yang mampu menyokong pergerakan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas untuk produk potensial seperti *garmen* maupun sejenisnya dengan mempertimbangkan pengurangan hambatan tarif. Tidak hanya itu saja, Bangladesh menggunakan BBPTA sebagai sarana untuk mendapatkan barang impor yang tidak cukup dimiliki untuk pembangunan Bangladesh yang lebih massif.

Kemudian jika ditinjau dari konsep hambatan tarif, Bangladesh dan Bhutan berupaya mengurangi hambatan tarif dalam mekanisme kerangka kerja BBPTA. Bentuk hambatan tarif sendiri salah satunya yaitu diterapkannya bea pada produk impor maupun ekspor. Rastikarany (2008) mengklasifikasikan hambatan tarif dalam bentuk bea, hambatan tarif dalam bentuk bea sendiri terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya tarif rendah, tarif sedang, dan tarif tinggi. Barang ekspor impor yang dikenakan biaya bea, khususnya bea tinggi dapat mengurangi minat negara dalam melakukan perdagangan internasional. Untuk itu maka diperlukannya sebuah opsi bagi suatu negara untuk dapat meniadakan hambatan bea tersebut sehingga dapat menarik minat bagi negara lainnya untuk dapat melakukan kerja sama khususnya dalam perdagangan internasional.

Amir (2003) juga mengklasifikasikan sistem tarif, yang mana sistem tarif sendiri yang penggunaannya telah disepakati oleh negara

terbagi menjadi 3 yaitu tarif tunggal, tarif umum/konvensional, dan tarif referensi. Dari penerapan tarif tersebut penggunaan tarif preferensi dapat digunakannya sebagai salah satu opsi menguntungkan bagi kedua negara. Hal tersebut dikarenakan tarif preferensi merupakan tarif eksklusif yang nilainya sampai 0%. Tarif Preferensi (*Preferential Tariff*) atau tarif eksklusif inilah yang juga sedang diupayakan dalam BBPTA. Tarif rendah adalah pemberian bea mulai dari rentang 0% -5% untuk produk-produk dalam aktivitas ekspor impor. Kerangka kerja sama BBPTA menyepakati tarif hingga mencapai 0% atau bebas tarif untuk beberapa produk-produk tersebut. Mengingat Bangladesh sendiri menerapkan bea tarif yang tinggi seperti untuk produk agrikultur yang dinilai sebagai salah satu produk unggulan Bangladesh. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi Bangladesh untuk dapat menarik minat investor maupun negara untuk dapat melakukan perdagangan internasional dengan Bangladesh. Untuk itu, Bangladesh sendiri kemudian memutuskan untuk dapat mengurangi hambatan tersebut dengan jalan melakukan kerja sama dengan Bhutan melalui BBPTA.

BBPTA sendiri telah menyepakati bahwa kedua negara akan mengurangi bea tarif yang bahkan mencapai 0% untuk produk ekspor impor. Tentunya baik kedua negara diuntungkan tanpa adanya beban sehingga mampu memaksimalkan hubungan kerja sama kedua negara. Setelah pemberian tarif rendah tersebut, kedua negara menyepakati bahwa harus diterapkannya tarif preferential mengingat hubungan kedua negara melalui perjanjian BBPTA adalah negara yang memiliki hubungan spesial. Bangladesh dan Bhutan sudah melakukan hubungan diplomatik sejak lama. Untuk kerja sama ekonomi sudah dilakukan sebelumnya, namun hanya sebatas *framework* saja. Berlakunya BBPTA kemudian menjadi pengikat bagi kedua negara bahwa baik

Bangladesh maupun Bhutan serius untuk mewujudkan hubungan erat khususnya dalam kerja sama ekonomi yang dulunya hanya sebatas *framework*. Dipilihlah tarif preferensi mengingat kedua negara secara khusus menyepakati diversifikasi produk ekspor impor serta meniadakan tarif bea bagi kedua negara. Hal ini tentu menjadi sebuah keistimewaan dalam kerja sama perdagangan Bangladesh dan Bhutan yang tidak didapatkan dalam kerja sama lainnya.

Kerangka kerja BBPTA menerapkan penggunaan tarif rendah dalam sistem tarif preferential. Keistimewaan ini tentu disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan Bangladesh. Pengurangan tarif 0%-5% untuk beberapa produk yang telah masuk dalam kesepakatan kerja sama BBPTA adalah produk unggulan masing-masing negara. Jika dijabarkan, produk unggulan Bangladesh seperti sektor tekstil diperlukan oleh Bhutan yang juga tengah menuju ke arah modernisasi. Begitupula dengan produk unggulan Bhutan berupa bahan materil bangunan sangat diperlukan oleh Bangladesh saat ini untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur Bangladesh. Produk unggulan atau potensial masing-masing negara ini mampu menjadi langkah awal untuk ekspansi pasar sehingga akan memberikan keuntungan langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang mana dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional tentu mendukung tujuan Bangladesh yang diwujudkan dalam kepentingan nasionalnya. Bangladesh sendiri menginginkan agar perekonomian yang semakin baik, yang mana hal tersebut dapat diwujudkan melalui BBPTA ini. Kerja sama ekonomi dapat terjalin, diterapkannya kegiatan ekspor impor untuk komoditi penting bagi negara, meningkatkan diversifikasi produk, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang diinginkan Bangladesh dalam mewujudkan

kepentingan negaranya. Melakukan kerja sama BBPTA dengan menerapkan tarif preferensi dengan memberikan tarif rendah guna meningkatkan aktivitas perdagangan internasional.

Langkah awal BBPTA ini dalam jangka panjang tentu akan berdampak terhadap interdependensi antar negara. Situasi *"take and give"* dalam kerja sama Bangladesh dan Bhutan ini menjadi semakin optimis dengan latar belakang hubungan diplomatik yang baik antara kedua negara (Sanjiwani, 2020). Situasi ini diakibatkan oleh kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan nasional berbanding terbalik dengan modal yang dimiliki negara sehingga memerlukan aktivitas ekspor dan impor untuk mencapai pemenuhan kebutuhan nasional. Kerja sama BBPTA ini juga menjadi langkah untuk membuka kerja sama yang lebih komprehensif kedepannya. Interdependensi kedua negara menjadi kemungkinan besar yang akan terjadi dalam jangka waktu mendatang.

Terakhir, jika ditinjau menggunakan konsep kepentingan nasional, terlihat bahwa Bangladesh ingin membuktikan negaranya dapat keluar dari *Least Development Country* yang rencana akan dicapai pada tahun 2026 mendatang menggunakan banyak perjanjian perdagangan baik berupa FTA ataupun PTA sebagai bukti perwujudan kepentingan tersebut. Bangladesh konsisten dan fokus untuk mengencakan proyek kerja sama ekonomi yang bersifat preferential dengan negara-negara sekitar sebagai bagian dari rencana untuk membantunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keluar dari status LDC. Bangladesh tidak hanya mengupayakannya dengan Bhutan, Bangladesh juga melakukan negosiasi *preferential trade agreement* dengan negara lainnya. Bangladesh tidak hanya mengupayakan untuk membangun kerja sama yang bersifat preferential namun mempererat kerja sama ekonomi yang sudah dibangun dalam kerangka *Free Trade Agreement*.

Kerja sama yang dijalin Bangladesh dalam bentuk preferential maupun kerja sama lainnya bertujuan untuk memperluas negara tujuan ekspor. Semakin luasnya ekspansi pasar akan mendukung pertumbuhan ekonomi Bangladesh. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan kesejahteraan Bangladesh. Sehingga tujuan akhirnya Bangladesh dapat keluar dari status LDC.

PENUTUP

Pemerintah Bangladesh telah menandatangani *preferential trade agreement* (PTA) dengan Pemerintah Bhutan ditandatangani pada 6 Desember 2020. Faktor pendorong Bangladesh untuk menyetujui perjanjian tersebut dapat dilihat dari segi kepentingan nasional yakni kepentingan ekonomi untuk keluar dari klasifikasi pertumbuhan ekonomi yang terbelakang. Secara eksplisit, adanya perjanjian *Bangladesh-Bhutan Preferential Trade Agreement* (BBPTA) tidak lain adalah sebagai bentuk simbolisasi hubungan diplomatik yang baik antar negara.

Bangladesh memiliki peran penting dalam hal ekspor dan impor di kawasan Asia Selatan sebab populasi penduduknya yang memiliki urutan ketiga setelah India dan Pakistan. BBPTA merupakan salah satu untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan bagi Bangladesh. Dengan menggunakan regulasi BBPTA, Bangladesh berupaya membangun kerja sama untuk menikmati keuntungan yang tidak di dapatkan dalam kerja sama regional.

Bangladesh berupaya melalui BBPTA untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan tarif pajak impor dan bebas regulasi tarif pajak lainnya. Mengingat penerapan bea dalam perdagangan internasional merupakan suatu hambatan dalam mewujudkan kegiatan ekspor impor bagi kedua negara. Untuk itulah diterapkannya sistem preferensi sebagai opsi bagi kedua negara dikarenakan sistem preferensi merupakan tarif eksklusif yang diterapkan dikarenakan adanya

hubungan spesial bagi dua negara. Untuk itu untuk memperkuat kerja sama tersebut disepakatilah bahwa kedua negara memberikan keringan dengan menerapkan tarif rendah sebesar 0% bagi produk ekspor impor kedua negara. Sehingga dengan adanya tarif rendah tersebut kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat lagu perekonomian bagi Bangladesh dalam mewujudkan kepentingan nasional, khususnya kepentingan ekonomi.

Status negara Bangladesh yang masih menjadi *Least Development Country* oleh *World Trade Organization* merupakan tahapan berarti bagi Bangladesh untuk meningkatkan status negara melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bangladesh mengupayakan keluar dari status LDC dengan menandatangani banyak perjanjian dagang internasional, bilateral maupun multilateral. BBPTA sebagai salah satu perjanjian intensif adalah salah satu strategi nyata agar pertumbuhan ekonomi Bangladesh bertumbuh yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan Bangladesh. Sehingga hal ini akan berangsur membantu Bangladesh lulus dari status LDC tahun 2026.

Daftar Pustaka

Buku

- Amir, M.S. (2003). *Ekspor dan Impor (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Penerbit PPM
- Nanang, M. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Depok: PT Rajagrafindo
- Lawrence, N. W. (2007). *Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education

Jurnal dan Skripsi:

- Candra Nadisa, G., Kumala Dewi, P., Prameswari, A. (2020). Faktor Pendorong Singapura Dalam Menandatangani Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement Pada Tahun 2018. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional) 1 (1). Diakses pada : [https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/56844] Diakses pada 20 Agustus 2023

Hafiz, Khairul. (2013). *Motivasi Indonesia Menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan tahun 2012*. Diunduh pada : [https://www.neliti.com/publications/31201/motivasi-indonesia-menandatangani-preferential-trade-agreement-pta-dengan-pakist] Diakses 3 Desember 2021

Ikhsan, Mochammad Al. (2020). *Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional*. Diunduh pada : [https://www.researchgate.net/publication/341114980_STUDI_LITERATUR_DAMPAK_TARIFF_BARRIER_DALAM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL] Diakses 19 November 2022

Indrayanthi, L., Kawitri Resen, P., & Kumala Dewi, P. (2020). *Kepentingan Ukraina Menerapkan Kebijakan Moratorium Ekspor Kayu Mentah Tahun 2015*. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). 1 (2). Diakses pada : [https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/62706] Diakses pada 19 Agustus 2023

Islam, Md. Rizwanul. (2021). *Bangladesh- Bhutan PTA: Less is More ?*. South Carolina: Journal of International Law and Business. Vol. 18 (1)

Nucterlain, Donald E. (1979). *National Interest A New Approach*. Orbis. Vol 23 (1) (Spring): 57

Putri, Sanjiwani, D., Kumala Dewi, P., & Dharmiasih, D. (2020). *Alasan Tiongkok Menjalin kerja Sama Sektor Energi Migas Dengan Brunei Darussalam Tahun 2013-2018*. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). 1 (2). Diakses pada : [https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/64301] Diakses pada 20 Agustus 2023

Rastikarany, Hikmah. (2008). *Analisis Pengaruh Kebijakan Tarif dan Non Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Tuna Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Wyrzykowska, Elzbieta Kawcka. (2020). *Importance and Motives of Preferential Trade Agreements in the EU's External Trade*. Diunduh pada : [https://www.researchgate.net/profile/ElzbietaKawckaWyrzykowska/publication/344177526_Importance_and_Motives_of_Preferential_Trade_Agreements_in_the_EU's_External_Trade/links/5f5912d792851c0789584573/Importance-and-Motives-of-Preferential-Trade-Agreements-in-the-EU's-External-Trade.pdf] Diakses pada 6 Desember 2021

Situs Online:

- Bangladesh Bureau of Statistics. (2022). *Population Statistics of Bangladesh*. Diunduh pada : [https://web.archive.org/web/20110904045106/http://www.bbs.gov.bd/Home.aspx] Diakses pada 20 September 2022
- Macro Trends. (n.d.). *Bhutan Trends - Tariff Rates*. Diunduh pada [macrotrends.net/countries/BTN/bhutan/tariff-rates] Diakses pada 17 September 2022
- Ministry of Foreign Affairs Royal Government of Bhutan. (2013). *First Bilateral Consultations between the Royal Government of Bhutan and the People's Republic of Bangladesh*. Diunduh pada [https://www.mfa.gov.bt/?p=1362] Diakses pada 22 Januari 2022
- Islam, M. D., & Thrasher, R. (2022). *The Price of Success? How Graduation from Least Developed Country Status Could Impact Insulin Accessibility in Bangladesh* | Global Development Policy Center. Boston University Global Development Policy Center. Diunduh pada [https://www.bu.edu/gdp/2022/05/02/the-price-of-success-how-graduation-from-least-developed-country-status-could-impact-insulin-accessibility-in-bangladesh/] Diakses pada 22 September 2022
- Syed. Ali Bahram. (2022). *The Financial Express: Our mega development projects*. Diunduh pada [https://thefinancialexpress.com.bd/views/our-mega-development-projects-1654097156] Diakses pada 16 September 2022
- United Nation: Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). *LDC Identification Criteria & Indicators*. Diunduh pada : [https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc_criteria.html] Diakses pada 30 Maret 2023
- United Nation: *Department of Economic and Social Affairs*. (n.d.). *Least Developed Country Category: Bangladesh Profile*. (n.d.). Diunduh pada : [https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-bangladesh.html] Diakses pada 30 Maret 2023
- U.S. Embassy in Bangladesh . (n.d.). *US- Bangladesh Relations - Bilateral Economic Relations*. (n.d.). Diunduh pada : [https://bd.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/bilateral-economic-relations/] Diakses pada 22 September 2022